

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

B2P pns
(Pemberian Bantuan Pendidikan PNS)



BKPSDM
Tahun 2023

FORMULIR PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2023 (KELOMPOK UMUM)

Judul Inovasi : "B2P PNS" (Pemberian Bantuan Pendidikan PNS)
Nama Unit Pelayanan Publik : Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya manusia Kota Madiun
Penulis Proposal : ASMIASRI
No hp : 081335502323
Tanggal mulai inovasi : 11 Maret 2022.
Umur inovasi : 12 Bulan.
Target SDGs : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
Kategori Inovasi : Pendidikan

Ringkasan

Menurunnya Indeks Profesionalitas ASN dibandingkan tahun sebelumnya merupakan masalah serius yang harus diupayakan agar terkendali dengan peningkatan 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN. Masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Madiun saat ini "Kurangya kualifikasi pendidikan PNS yang memiliki ijazah Sarjana dan Magister". Melalui "B2P PNS" diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS selain Guru yang menempuh pendidikan Sarjana dan Magister dengan tahapan pendaftaran, penentuan rangking dan kemudian penetapan penerima bantuan.

1. Latar belakang dan Tujuan

Pemerintah Kota Madiun berupaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN dengan permasalahan "*Rendahnya kualifikasi pendidikan PNS yang berijazah S1 dan S2*", akibat kurangnya minat pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, sehingga diperlukan terobosan baru untuk mengatasi masalah ASN memenuhi kebutuhan operasional selama mengikuti pendidikan dengan memberikan bantuan pendidikan bagi PNS yang berpendidikan SLTA sederajat, paket C agar dapat melanjutkan pendidikan terakhir nya ke Jenjang S1 dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih berpendidikan S1 untuk melanjutkan ke Jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 atau Magister.

Batasan untuk mendapatkan B2P dalam ketentuan yang mengatur tentang pemberian bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada PNS yang mengikuti izin tugas belajar mulai Bulan Januari Tahun 2019, untuk pengajuan izin belajar sebelum tahun tersebut sudah tidak mendapatkan bantuan B2P tersebut.

Target "B2P PNS"

- Periode April 2022 sejumlah 38 orang dengan rincian :
 - Jenjang Pendidikan S1 = 23 orang
 - Jenjang Pendidikan S2 = 15 orang
- Periode November 2022 sejumlah 30 orang dengan rincian :
 - Jenjang Pendidikan S1 = 13 orang
 - Jenjang Pendidikan S2 = 17 orang
- Periode Juni 2023 direncanakan :
 - Jenjang Pendidikan S1 = 15 orang
 - Jenjang Pendidikan S2 = 15 orang
- Periode November 2023 biaya anggaran yang akan diserahkan dengan jumlah yang sama dengan jenjang pendidikan yang sama pula.

2. Kebaruan/nilai tambah

memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan "B2P PNS" diharapkan terciptanya PNS (Aparatur Birokrasi) yang berkualitas, memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor profesionalisme aparaturnya, sedangkan untuk mendapatkan aparatur yang profesional diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi. Hal ini penting dan esensial karena pelayanan publik merupakan pelayanan berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. dengan "B2P PNS" BKPSDM Kota Madiun berupaya mewujudkan profesionalisme aparatur pelayanan publik.

3. Implementasi

Dengan Peraturan Walikota Madiun No 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang menempuh Pendidikan Sarjana dan Magister", "B2P PNS" dijadwalkan selama 2 (dua) periode dalam 1 tahun. Pada setiap periode penyerahan pasti menyisakan PNS masuk target B2P PNS. Langkah antisipasi, menunggu masa dalam 6 (enam) bulan dengan ketentuan berkas-berkas yang dipersyaratkan lengkap maka masuk dalam daftar tunggu untuk diajukan pada nominator utama dalam "B2P PNS" tahap berikutnya.

4. Signifikansi

Kondisi eksisting kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2021 melalui program "*Pengembangan Sumber Daya Manusia*", berdasarkan data LAKIP Tahun 2021, yaitu :

1. Jumlah pegawai yang memiliki ijazah S1 dan S2 sejumlah 69,40 %
2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi yang disyaratkan sebanyak 80 %
3. Jumlah Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi sejumlah 80 %
4. Jumlah pegawai yang melaksanakan pengelolaan pengembangan kompetensi dibandingkan dengan peta jabatan sebanyak 67 %

Harapan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022 melalui program "*pengembangan sumber daya manusia*", berdasarkan target RENSTRA Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang memiliki ijasan S1 dan S2 meningkat menjadi 70,66 %
2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi yang disyaratkan meningkat sebanyak 85 %
3. Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi naik menjadi 85 %
4. Jumlah pegawai yang melaksanakan pengelolaan pengembangan kompetensi dibandingkan dengan peta jabatan naik menjadi 78%

5. Adaptabilitas

Inovasi ini belum direplikasi, "B2P PNS" ini murni merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Madiun, dengan tujuan yang utama untuk mendorong dan memberikan stimulan kepada PNS yang menempuh pendidikan jenjang S1 dan S2. Mungkin di masa yang akan datang apabila anggaran mencukupi, sasaran bantuan tersebut akan diperluas untuk diberikan kepada PNS yang menempuh pendidikan jenjang S3, kepada PNS yang menempuh pendidikan Paket C dan Paket B, serta pemberian reward kepada PNS yang

berprestasi untuk menempuh pendidikan jenjang S3. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pemerintah Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pegawainya.

6. Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

Inovasi ini diterapkan pada tahun anggaran 2022, dengan dukungan belanja sumber daya keuangan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 336.000.000;

b. Sumber Daya Manusia, seluruh pegawai yang terlibat secara langsung dari BKPSDM Kota Madiun

o Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi

Bertugas mendukung Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dan data Pegawai untuk pendataan dan pendaftaran "B2P PNS"

o Sekretariat

Bertugas mendukung pada bidang tata usaha perkantoran dan penyerapan anggaran

o Bidang Mutasi

Bertugas mendukung monitoring dan evaluasi kegiatan B2P

o Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bertugas merencanakan, melaksanakan serta melaporkan rangkaian kegiatan

c. Metode mekanisme/alur, dengan mengadakan sosialisasi kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian/pengelola kepegawaian Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada PNS selain Guru agar mendaftarkan PNS dilingkungannya secara bertahap.

d. Peralatan dan Material yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan ini yaitu :

- Selama aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dalam perbaikan dan pengembangan migrasi ke Sistem Informasi Kepegawaian, maka dilakukan secara manual
- Komputer
- ATK

7. Strategi Keberlanjutan

Strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan inovasi. Dengan "B2P PNS" ini dalam pelaksanaannya menemui beberapa penyesuaian yang harus dilakukan karena ada evaluasi dari Panitia Seleksi, sehingga pada Bulan Desember 2022 telah dilakukan rapat koordinasi yang mensepakati bahwa Peraturan Walikota Madiun No 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang menempuh Pendidikan Sarjana dan Magister untuk direvisi utamanya pada masalah yang mendasari masa pemberian bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada pegawai.

Pada saat Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) masih berfungsi para pemohon dapat mengajukan permohonannya secara paperless. Namun karena Aplikasi tersebut terkendala akibat pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang migrasi ke Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), maka BKPSDM memberlakukan permohonan peserta secara langsung dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yaitu :

- Tidak berlaku bagi PNS yang sudah lulus atau menyelesaikan yudisium
- Sudah memiliki surat ijin belajar atau sebutan lain